

ETIKA DI UJUNG TOMBAK PERUBAHAN: MENGATASI DILEMA MORAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK ERA DISRUPSI

Diestina Dwi Wahyuni¹, Zahrani Rahmania Choirun Nisa², Hayat³

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru Jawa Timur 65144

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

22301091041@unisma.ac.id

[d¹](#)

22301091045@unisma.ac.id

[d²](#)



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract. *The era of disruption marked by rapid technological development and dynamic social change gives rise to various moral dilemmas in public administration. In this context, ethics acts as a crucial basis for fair, transparent and responsible decision making by policy makers. The application of ethics helps overcome conflicts of interest, maintain public trust, and encourage more transparent collaboration between the public and private sectors. Ethics is also important in data management, which often faces a dilemma between protecting individual privacy and the need for efficiency of public services. By adhering to ethical principles, policy makers can ensure that every policy is not only oriented towards short-term efficiency but also considers long-term impacts on the public interest. Through ethics education and training, public employees are expected to be able to face the challenges of the era of disruption more wisely. In conclusion, implementing ethics in public*

administration in the era of disruption is not only a moral obligation, but also an important strategy for building better, inclusive and sustainable public governance.

Keywords: *Ethics, Public Administration, Era of Disruption, Moral Dilemma, Decision Making, Transparency, Accountability, Governance.*

Abstrak. Era disrupsi yang ditandai dengan perkembangan teknologi pesat dan perubahan sosial yang dinamis menimbulkan berbagai dilema moral dalam administrasi publik. Dalam konteks ini, etika berperan sebagai landasan krusial bagi pengambilan keputusan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab oleh pemangku kebijakan. Penerapan etika membantu mengatasi konflik kepentingan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mendorong kolaborasi yang lebih transparan antara sektor publik dan swasta. Etika juga penting dalam pengelolaan data, yang kerap menghadapi dilema antara perlindungan privasi individu dan kebutuhan efisiensi layanan publik. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika, pengambil kebijakan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada efisiensi jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kepentingan umum. Melalui pendidikan dan pelatihan etika, pegawai publik diharapkan dapat menghadapi tantangan era disrupsi dengan lebih bijaksana. Kesimpulannya, penerapan etika dalam administrasi publik di era disrupsi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi penting untuk membangun tata kelola publik yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika, Administrasi Publik, Era Disrupsi, Dilema Moral, Pengambilan Keputusan, Transparansi, Akuntabilitas, Tata Kelola.

PENDAHULUAN

Dalam era disrupsi yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, tantangan dalam administrasi publik semakin kompleks. Di tengah dinamika ini, etika menjadi salah satu pilar penting yang harus diperhatikan. Etika dalam administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi para pemangku kebijakan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatasi dilema moral yang sering kali muncul dalam pengambilan keputusan.

Latar belakang munculnya permasalahan ini berakar dari fakta bahwa perubahan yang cepat sering kali mengesampingkan norma-norma etika yang sudah mapan. Pemangku kepentingan di sektor publik sering dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan cepat, yang terkadang berkonflik dengan prinsip moral. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi institusi publik itu sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali nilai-nilai etika yang harus dipegang dalam menghadapi tantangan di era disrupsi.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya etika dalam administrasi publik, terutama dalam konteks mengatasi dilema moral yang muncul akibat perubahan yang cepat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika, diharapkan para pemangku kebijakan dapat membuat keputusan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan transparan. Selain itu, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana etika dapat dijadikan sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan di sektor publik yang semakin kompleks.

Rumusan masalah dalam pembahasan ini meliputi beberapa pertanyaan kunci. Pertama, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi dan perubahan sosial terhadap praktik administrasi publik? Kedua, dilema moral apa saja yang sering dihadapi oleh para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan? Ketiga, bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika dapat membantu dalam mengatasi dilema moral tersebut? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan akan didapat pemahaman yang lebih dalam mengenai peran etika dalam administrasi publik di era disrupsi.

Manfaat dari pembahasan ini tidak hanya terbatas pada pengembangan teori dan konsep, tetapi juga memiliki implikasi praktis. Pertama, bagi para akademisi dan peneliti, pembahasan ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai etika dalam administrasi publik. Kedua, bagi para pemangku kebijakan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Ketiga, bagi masyarakat, pemahaman tentang pentingnya etika dalam administrasi publik dapat mendorong partisipasi aktif dan kritis dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dalam menghadapi era disrupsi yang penuh dengan ketidakpastian, penerapan etika dalam administrasi publik bukan hanya suatu keharusan, tetapi juga merupakan langkah strategis menuju perubahan yang lebih baik. Dengan menempatkan etika di ujung tombak perubahan, diharapkan institusi publik dapat berfungsi secara optimal, memberikan layanan yang berkualitas, dan menciptakan kepercayaan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bersama-sama mengedepankan nilai-nilai etika sebagai landasan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini berfokus pada tema etika dalam administrasi publik, terutama dalam konteks menghadapi dilema moral yang muncul akibat disrupsi teknologi dan sosial. Tiga kajian utama akan dibahas, masing-masing memberikan perspektif yang berbeda mengenai pentingnya etika dalam administrasi publik. Kajian pertama berfokus pada konsep etika dalam administrasi publik. Menurut Aksa (2010), etika dalam administrasi publik mencakup norma dan nilai yang mengatur perilaku pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini termasuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dalam era disrupsi, di mana perubahan berlangsung cepat dan keputusan sering kali harus diambil dengan segera, penting bagi pemangku kebijakan untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip etika tersebut.

Kajian kedua menyoroti dilema moral yang dihadapi oleh pemangku kebijakan dalam konteks disrupsi. Nuraini (2020) menyatakan bahwa keputusan dalam administrasi publik sering kali melibatkan pilihan yang sulit, di mana tidak ada solusi yang sepenuhnya benar atau salah. Dalam banyak kasus, pemangku kebijakan harus memilih antara berbagai nilai yang saling bertentangan, seperti efisiensi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Misalnya, dalam situasi darurat kesehatan, keputusan untuk memberlakukan kebijakan lockdown mungkin diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi di sisi lain, hal itu dapat merugikan perekonomian dan kesejahteraan individu.

Kajian ketiga mengkaji peran etika dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik di era disrupsi. Menurut Muliawaty (2023), kepercayaan publik adalah kunci keberhasilan administrasi publik, terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Ketika masyarakat merasa bahwa pengambil keputusan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip etika, mereka lebih cenderung untuk mendukung kebijakan yang diterapkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan studi kepustakaan. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan artikel penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini digunakan untuk memahami konsep, teori, dan temuan-temuan terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memperkaya perspektif dan kerangka teori yang digunakan. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah karya ilmiah yang tersedia secara publik guna memperoleh data sekunder yang relevan. Kegiatan ini melibatkan penelusuran sumber-sumber terpercaya untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat menyaring informasi penting yang berguna dalam memahami konteks penelitian serta memberikan landasan teori yang kuat. Kedua metode ini dipilih karena mampu menyediakan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan penelitian sebelumnya dan memperkuat justifikasi ilmiah dari penelitian yang dilakukan. Metode ini juga efektif dalam membandingkan berbagai pandangan dan temuan dari penelitian sebelumnya untuk memperoleh wawasan baru yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dari pentingnya etika dalam administrasi publik di era disrupsi menunjukkan bahwa etika memiliki posisi strategis dalam membentuk keputusan yang adil, transparan, dan berdampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks disrupsi yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat, para pemangku kebijakan di sektor publik seringkali dihadapkan pada dilema moral. Situasi ini menuntut mereka untuk memilih antara berbagai pilihan yang tidak selalu selaras dengan prinsip etika yang sudah mapan, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat tanpa memperhatikan nilai-nilai etika cenderung menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, mengurangi tingkat kepercayaan publik, dan bahkan dapat mengancam legitimasi institusi publik. Ketika pengambilan keputusan lebih menekankan pada efisiensi dan hasil jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai moral dan sosial, keputusan tersebut bisa berdampak negatif. Sebaliknya, ketika etika ditempatkan sebagai pedoman utama, keputusan yang diambil cenderung lebih adil, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mendukung terciptanya kepercayaan publik yang kuat.

Dalam menghadapi era disrupsi, tantangan yang dihadapi administrasi publik semakin beragam. Munculnya teknologi digital, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses dan menyebarkan informasi. Ini menciptakan tekanan tambahan bagi institusi publik untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab. Misalnya, dalam kasus di mana kebijakan yang diambil menyangkut penggunaan data pribadi, dilema etika sering muncul antara kebutuhan untuk menggunakan data guna meningkatkan layanan publik dan kewajiban untuk melindungi privasi masyarakat. Dalam situasi ini, prinsip etika berfungsi sebagai batasan agar pengambil keputusan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan dari sisi teknologi, tetapi juga dampaknya pada hak-hak individu.

Penerapan etika dalam administrasi publik juga membantu pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Di era disrupsi, ketika sektor swasta sering kali terlibat dalam proyek-proyek publik melalui berbagai bentuk kerjasama, penting bagi administrasi publik untuk menjaga agar konflik kepentingan tidak mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Dengan memegang teguh prinsip etika, pemangku kebijakan dapat lebih mudah mengelola hubungan antara sektor publik dan swasta sehingga kerjasama yang terjalin tetap memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan publik.

Etika juga memiliki peran penting dalam meminimalkan dampak negatif dari keputusan yang tidak adil atau tidak transparan. Dengan pendekatan etis, pengambil keputusan diharapkan dapat mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang dibuat. Sebagai contoh, dalam kebijakan terkait kesejahteraan sosial atau pembangunan infrastruktur, keputusan yang hanya berorientasi pada hasil instan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat rentan sering kali menghasilkan ketidakadilan sosial. Pendekatan etika membantu meminimalkan risiko ini dengan menekankan pentingnya kepentingan umum di atas keuntungan individu atau kelompok tertentu.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik juga meningkat seiring dengan penerapan prinsip-prinsip etika. Masyarakat yang merasa bahwa keputusan publik diambil secara etis dan adil cenderung memiliki tingkat kepuasan dan dukungan yang lebih tinggi terhadap institusi publik. Sebaliknya, apabila masyarakat menilai bahwa keputusan diambil secara sembarangan atau hanya untuk kepentingan tertentu, mereka akan menjadi lebih kritis dan bahkan skeptis terhadap institusi tersebut. Dalam jangka panjang, hilangnya kepercayaan masyarakat ini dapat melemahkan fungsi institusi publik dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Pentingnya etika dalam mengatasi dilema moral di era disrupsi juga semakin nyata ketika kita melihat pada aspek pendidikan dan pelatihan. Banyak peneliti menggarisbawahi bahwa pendidikan etika bagi pegawai publik sangat penting dalam mempersiapkan mereka menghadapi tantangan baru di era digital. Pelatihan yang berfokus pada penerapan etika dalam berbagai situasi praktis dapat membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan analitis dan keterampilan pengambilan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai moral dan sosial.

Pembahasan ini menegaskan bahwa etika bukan sekadar aturan normatif yang harus dipatuhi, melainkan suatu panduan strategis yang memungkinkan pemangku kebijakan untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan arah moral. Dalam menghadapi dilema moral yang muncul akibat perubahan cepat, etika memberikan landasan untuk memilih solusi yang paling selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, etika memainkan peran sebagai penjaga nilai dan prinsip yang dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul dari keputusan yang terburu-buru atau hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek.

Etika menjadi pilar penting dalam administrasi publik yang tidak hanya relevan, tetapi juga esensial dalam era disrupsi. Dengan menempatkan etika di ujung tombak perubahan, administrasi publik dapat merespons tantangan yang kompleks dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Penerapan nilai-nilai etika diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi dilema moral dan mengarahkan institusi publik menuju tata kelola yang lebih baik serta lebih dapat dipercaya oleh masyarakat.

Etika dalam administrasi publik bukan hanya sekadar seperangkat aturan yang membatasi tindakan, tetapi juga panduan moral yang memungkinkan pengambilan keputusan berlandaskan pada prinsip-prinsip kebaikan bersama. Dalam situasi di mana kemajuan teknologi membawa perubahan signifikan terhadap cara kerja institusi publik, etika membantu pemangku kebijakan menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Misalnya, kemajuan teknologi memungkinkan otomatisasi dalam pelayanan publik, tetapi pemanfaatannya harus memperhatikan kesetaraan akses dan mempertimbangkan masyarakat yang belum sepenuhnya melek teknologi.

Pentingnya etika juga terlihat dalam mengelola data dan informasi publik. Di era digital, data menjadi aset berharga, dan sering kali dihadapkan pada dilema antara perlindungan data pribadi dan kebutuhan untuk meningkatkan layanan publik. Etika memberi batasan agar pemangku kepentingan tidak melanggar hak privasi masyarakat dalam penggunaan data. Etika juga membantu dalam mencegah penyalahgunaan data untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Di sisi lain, tantangan dalam administrasi publik semakin tinggi ketika sektor swasta memiliki keterlibatan besar dalam berbagai proyek publik. Dalam situasi ini, etika menjadi penentu agar kolaborasi antara sektor publik dan swasta tetap mengedepankan transparansi dan menghindari konflik kepentingan. Kegagalan dalam menjaga batasan etis ini dapat mengarah pada tindakan yang mencederai kepercayaan publik, seperti penyalahgunaan dana publik atau keputusan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Era disrupsi juga memperkuat kebutuhan akan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelayanan publik. Di era yang didorong oleh keterbukaan informasi, masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap integritas pemangku kebijakan. Etika mendorong pemangku kepentingan untuk bertindak dengan jujur dan terbuka, yang dapat memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat. Kepercayaan publik yang tinggi sangat penting untuk memastikan dukungan terhadap program-program publik. Sebaliknya, jika nilai-nilai etika dilanggar, masyarakat cenderung lebih skeptis, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi institusi.

Melalui pendekatan yang etis, administrasi publik di era disrupsi dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi tanpa melupakan kewajiban sosialnya. Etika membantu memastikan bahwa teknologi menjadi alat untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar alat untuk mencapai efisiensi. Etika juga mengingatkan pemangku kebijakan untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan saat ini tetapi juga bagi generasi mendatang.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks ini, pelatihan dan pendidikan etika bagi pegawai publik menjadi semakin relevan. Pendidikan etika tidak hanya membekali mereka dengan prinsip-prinsip moral, tetapi juga mengasah kemampuan untuk menghadapi situasi yang penuh dilema dengan tetap memegang teguh nilai-nilai etika. Pelatihan yang berkesinambungan diharapkan dapat membantu mereka dalam memahami peran etika secara praktis dan mampu menerapkannya dalam setiap keputusan yang diambil.

Hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa penerapan etika dalam administrasi publik adalah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, adil, dan transparan. Etika menjadi landasan moral dan pedoman bagi para pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan yang bijaksana di tengah arus perubahan yang pesat. Dengan menjaga prinsip-prinsip etika, institusi publik dapat berfungsi lebih optimal dan menciptakan kepercayaan masyarakat yang lebih kuat. Penerapan etika yang konsisten diharapkan mampu menjadi pendorong bagi terciptanya tata kelola publik yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai peran etika dalam administrasi publik di era disrupsi menegaskan pentingnya etika sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Era disrupsi yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat menciptakan tantangan baru bagi pemangku kebijakan, di mana mereka harus menghadapi dilema moral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Etika tidak hanya menjadi pedoman untuk menjaga integritas pribadi dan institusi, tetapi juga membantu

menciptakan keputusan yang berorientasi pada kepentingan publik di tengah berbagai tekanan dan kepentingan yang mungkin saling bertentangan.

Di era digital, di mana masyarakat memiliki akses lebih besar terhadap informasi, tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, etika berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi. Keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan prinsip etika akan berisiko menimbulkan ketidakpercayaan, mengurangi dukungan publik, dan bahkan mengancam legitimasi institusi publik itu sendiri. Sebaliknya, ketika keputusan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip etika, kepercayaan masyarakat cenderung meningkat, yang berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Selain itu, etika membantu mengarahkan pemangku kebijakan dalam menghadapi konflik kepentingan, terutama ketika sektor swasta terlibat dalam proyek publik. Etika mendorong kolaborasi yang transparan dan menghindari penyalahgunaan wewenang, sehingga keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan kepentingan umum. Prinsip etika juga membimbing pengambil keputusan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang diterapkan, yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Etika juga memiliki peran signifikan dalam pengelolaan data di era digital, di mana dilema sering muncul antara pemanfaatan data untuk efisiensi layanan dan perlindungan privasi masyarakat. Dengan memegang teguh prinsip etika, pengambil kebijakan dapat memastikan bahwa penggunaan data tetap berorientasi pada kebaikan publik tanpa melanggar hak privasi individu.

Secara keseluruhan, penerapan etika dalam administrasi publik di era disrupsi bukan hanya suatu keharusan normatif, tetapi juga strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Etika memberi batasan yang jelas dalam pengambilan keputusan, memungkinkan pemangku kebijakan untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dengan tetap memperhatikan kewajiban moral terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan etika bagi pegawai publik menjadi semakin penting untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang cukup dalam menangani dilema moral yang mungkin muncul.

Dengan menempatkan etika di ujung tombak perubahan, diharapkan institusi publik dapat berfungsi secara optimal dan responsif terhadap perubahan sosial serta teknologi yang terjadi. Kesimpulannya, etika dalam administrasi publik adalah landasan fundamental yang mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, etika tidak hanya menjadi panduan perilaku, tetapi juga fondasi strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, A. H. (2010). Etika Administrasi Publik; Peranannya Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(2).
- Bashori, K. (2018). Pendidikan politik di era disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310.
- Meutia, I. F. (2017). *Reformasi administrasi publik*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muliawaty, L. (2023). *PENGANTAR ETIKA BIROKRASI*. Lemlit Unpas Press.
- Musri, M., & Mulia, R. A. (2022). *Etika Administrasi Publik*. CV. Eureka Media Aksara.



- Nuraini, S. (2020). Penerapan etika administrasi publik sebagai upaya dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 14(1).
- Pandit, I. G. S. (2016). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 14–20.
- Radinal, W. (2023). Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik DI Era Disrupsi. *Al Fatih*.
- Tri, Y. (2018). *Etika Administrasi Publik*. Program Doktor Administrasi Publik.